**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI LIHAT DARI ASPEK SUMBER DAYA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Strata 1 (S1)

****

Oleh

RAHMAD ALAMIN

NIM. 219.057.20201.3356

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TABALONG**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI LIHAT DARI ASPEK SUMBER DAYA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG

1. Nama Mahsiswa : RAHMAD ALAMIN

NIM : 219.057.20201.3356

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

1. Disetujui Oleh

Ketua Komisi Penguji : Hj rahmi hayati S.Sos M.Ap (……………...)

NIK. 005 057 012

Penguji I : H. Suwandi, S.Sos, M.Ap (..…………….)

NIK. 005 057 083

Penguji II : Edy Suryani, S.Sos, MA (.……………..)

NIK . 005 057 079

1. Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS dalam mempertahankan ujian skripsi pada tingkat Strata Satu(S-1) pada Tanggal 05 Agustus 2023

Tanjung, …………..2023

Mengetahui,

Ketua STIA Tabalong, Ketua Prodi Administrasi Publik

**Dr. H. Jauhar Arifin, Drs, MM Lilis Suryani S.AP, M.AP**

**NIK. 005 057 022 NIK. 005.057.085**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SIDANG SKRIPSI**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI LIHAT DARI ASPEK SUMBER DAYA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG

Oleh:

RAHMAD ALAMIN

NIM. 219.057.20201.3356

Pembimbing

**………………………**

Pembimbing

H. SUWANDI,S.Sos,M.AP  
NIK.005.057.079

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAD ALAMIN

Nim : 219.057.20201.3356

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Lihat Dari

Aspek Sumber Daya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tabalong

Menyatakan dengan sebenar-benarnya sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akadamik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjung, 2023

Rahmad Alamin

NIM: 219.057.20201.3356

**SURAT BEBAS PLAGIASI**

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Karunia Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong” dapat selesai sesuai waktu yang telah ditentukan.

Peneyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, pengarahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Ahmat Harahap,M.A.P selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong dan juga sebagai penguji I.
2. Ibu Lilis suryani S.AP, M.AP Selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong.
3. Bapak H. Suwandi,S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, arahan, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dosen-dosen dan tenaga pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong yang telah membantu dan memberikan ilmu serta pengalaman selama menjalani proses perkulihan.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong yang telah bersedia memberikan informasi serta membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah mengajarkan tentang kemandirian, kesabaran, ketulusan dan semua hal yang baik serta senantiasa mendoakan keberhasilan saya dan memberi saya kekuatan.
7. Ucapan Terimaksih penulis kepada orang terdekat yang mana selalu sabar, setia dan mendukungku selama ini.
8. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan dan sahabat karabat terdekatku.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan atas bantuannya dalam memberikan bimbingan, arahan, semoga Allah SWT membalas dengan pahala dan nikmatnya. Amin.

Tabalong, 2023

Penulis

RAHMAD ALAMIN

NIM: 219.057.20201.3356

**KATA PENGANTAR**

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, dengan limpahan rahmat serta izin-nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong”. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, dorongan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu tiada kata yang pantas untuk menghargai selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pembimbing saya yang sudah berkenan dalam meluangkn waktunya untuk membimbing saya dalam pembuatan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk membangun demi terciptanya kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfat dan memperkaya khasanah akademis.

Tabalong, 2023

Penulis

RAHMAD ALAMIN

NIM: 219.057.20201.3356

**ABSTRAK**

**Rahmad Alamin,** NIM. 219.057.20201.3356, Program Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, 2023. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong**.** H. Suwandi,S.Sos, M.AP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Keadaan lingkungan di kawasan padat penduduk khususnya di komplek-komplek perumahan yang ada di perkotaan belum dapat dikatakan sehat dan bersih disebabkan masih terdapat tumpukan - tumpukan sampah dipinggir jalan maupun di lahan lahan yang kosong. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu masalah yang terjadi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian teknik pengabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong secara umum telah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari 1. Implementasi yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dimana kebijakan yang di terapkan sudah banyak yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kerjasama, komitmen, dan koordinasi antara pimpinan atau kepala dinas dengan pegawai nya sudah terjalin dengan baik. 2. Aspek sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sudah memadai ini bisa kita lihat dimana sumber daya peralatan nya tiap tahun meningkat atau bertambah baik dari truk pengangkut maupun sumber daya manusia nya dimana tiap adanya kebutuhan penambahan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong akan menambah sesuai dengan keperluan nya. dan terakhir aspek sumber daya anggaran dimana tiap tahun nya sudah baik dan terus meningkat kita bisa lihat dari banyak nya kebutuhan pengangkutan sampah yang ada di wilayah nya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong selalu menambah personel maupun peralatan yang dibutuhkan oleh pegawainya demi terciptanya Tabalong yang bersih dan sehat.

***Kata kunci*** *: Implementasi Kebijakan*, Sumber daya, *Sampah*

**DAFTAR ISI**

Halaman

**LEMBAR PENGESAHAN** i

**LEMBAR PERSETUJUAN** II

**PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI** iii

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI** iv

**UCAPAN TERIMA KASIH** v

**KATA PENGANTAR** vii

**ABSTRAK** viii

**DAFTAR ISI** ix

**DAFTAR TABEL** x

**DAFTAR GAMBAR** xi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat penelitian 7

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Penelitian terdahulu 8

B. Kerangka Teori 12

C. Kerangka konseptual 33

**BAB III METODE PENELITIAN**

A.Pendekatan dan jenis penelitian 38

B. Lokasi penelitian 38

C. Informan 39

D. Sumber data 40

E. Teknik Pengumpulan Data 41

F. Analisis data 44

G. Jadwal penelitian 46

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 47

B. Hasil penelitian 53

C. Pembahasan Hasil Penelitian 68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan 72

B. Saran 72

**DAFTAR PUSTAKA** 83

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

No. Judul Tabel Halaman

1. Tabel jumlah penduduk Kabupaten Tabalong 52
2. Tabel rekapitulasi 68

**DAFTAR GAMBAR**

No. Judul Gambar Halaman

1. Model Interaktif Miles dan Huberman 45

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sampah menjadi suatu problema yang sangat pelik dalam suatu daerah perkotaan maupun pedesaan ketika sampah tidak teroganisir dengan baik akibat pertumbuhan jumlah penduduk di perkotaan setiap tahunnya bertambah di karenakan adanya urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota). Dan disamping itu juga adanya perusahaan – perusahaan yang terdiri di wilayah daerah tersebut dan banyaknya perumahan – perumahan yang di bangun seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Tabalong sehingga dengan adanya pembangunan di berbagai sektor, maka salah satu dampak yang terlihat dari kegiatan masyarakat tersebut adanya timbulnya tumpukan sampah yang menjadi permasalahan yang harus di atasi oleh daerah.

Oleh karena itu sampah juga telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah prilaku masyarakat, Sampah semakin hari semakin sulit dikelola, hingga di samping kesadaran dan partisipasi masyarakat, pengembangan teknologi dan pengelolaan sampah yang berwawasan, lingkungan merupakan usaha alternatif untuk memelihara lingkungan yang bersih dan sehat dapat memberi manfaat lain, tingkat partisipasi masyarakat perkotaan dalam menangani dan mengelola sampah secara mandiri masih dalam katagori sedang sampai rendah, masyarakat masih enggan melakukan pemilahan.

Permasalahan sampah merupakan salah satu fenomena sosial yang sampai saat ini belum mampu di atasi secara tuntas oleh Pemerintah Indonesia. Setiap kota maupun desa di Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk banyak dengan pola konsumsi yang beragam, akibat dari tingginya aktivitas masyarakat itu sendiri dihadapkan pada masalah sampah ini. Jumlah penduduk dan pola konsumsi seperti itu pada akhirnya berpotensi menimbulkan volume, jenis dan karakteristik sampah terus meningkat dan menjadi masalah karena belum diimbangi dengan pengelolaan persampahan yang baik.

Pengelolaan persampahan menjadi tanggung jawab daerah untuk mengatur dan mengelolanya, pembagian kewenangan ini secara langsung dilakukan pemerintah daerah baik pembiayaan serta proses penyediaan infrasrtruktur daerah yang diperlukan, tujuannya agar tercapainya efektitas dengan dikeluarkan kebijakan daerah berupa peraturan daerah, dan tingkat keseriusan pemerintah dalam melakukan penataan perkotaan

Pengelolaan persampahan suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen.

Pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulnya sampah karena tidak seimbangnya sumber daya yang ada dengan keadaan alam, sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat pula, sehingga terjadilah penumpukan sampah serta volume sampah yang sangat tinggi

Data Volume Sampah UPTD TPA Per Bulan Tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | BULAN | VOLUME (TON) | KETERANGAN |
| 1. | Januari | 1.814,91 |  |
| 2. | Februari | 1.632,20 |  |
| 3. | Maret | 1.793,45 |  |
| 4. | April | 1.721,17 |  |
| 5. | Mei | 1.565,63 |  |
| 6. | Juni | 1.500,20 |  |
| 7. | Juli | 1.606,92 |  |
| 8. | Agustus | 1.781,01 |  |
| 9. | September | 2.031,82 |  |
| 10. | Oktober | 2.196,07 |  |
| 11. | November | 2.192,69 |  |
| 12. | Desember | 2.081,70 |  |
|  | JUMLAH | 21.917,77 | Ton/Per Tahun |

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan akan mengakibatkan melonjaknya sampah perkotaan Jumlah penduduk Kabupaten Tabalong 268.985 jiwa yang terdiri dari 12 kecamatan, 122 desa, dan 9 kelurahan (BPS Kab. Tabalong 2020., tingkat perekonomian dan tingkat daya beli masyarakat yang semakin meningkat yang akan menyebabkan banyaknya sampah. Ruang lingkup pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Kelurahan belum terakses pelayanan pengangkutan persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Sumber Daya Manusia Mempunyai Peran Utama dalam setiap Kegiatan pengelolaan Sampah oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas Sumber daya Manusia agar terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dalam mengatasi masalah sampah.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tabalong yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang pemerintah daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Namun realitasnya implementasi kebijakan tidak berjalan optimal terlihat tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap peduli sampah, tempat pembuangan sampah masih belum dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai sehingga masyarakat membuang sampah seenaknya.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong didukung dengan kehadiran satuan tugas K5 di setiap kelurahan namun masih belum efektif. Implementasi sebagai bagian dari proses kebijakan publik tidak boleh diabaikan karena keberhasilan suatu kebijakan atau keputusan mencapai tujuan ditentukan oleh tahapan implementasi (Akib, 2010). Jika implementasi berhasil dilakukan, maka kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan. Jika mpementasi berhasil dilakukan, maka kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan atau melaksanakan kebijakan diperlukan sarana dan sumber daya.

Menurut Dunn (2013) menyatakan karakteristik implementasi kebijakan adalah kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Implementasi kebijakan pada dasarnya sebuah kebijakan yang dapat mencapai sebuah tujuan dengan sebuah cara. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik melalui dua cara yakni secara langsung melalui bentuk program atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Salah satu model implementasi kebijakan yang sering digunakan adalah model yang dikemukakan George C. Edward III yang memperhatikan empat aspek diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi diperlukan dalam rangka melaksanakan sebuah kebijakan sehingga para pelaksana kebijakan memiliki pemahaman semakin konsisten menjalankan tugas secara efektif. Sumberdaya merupakan salah aspek dibutuhkan dalam terselenggaranya tujuan kebijakan baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Disposisi menunjukan bahwa komiten dan kejujuran dibutuhkan dalam implementasi kebijakan atau sebuah program. Sementara struktur birokrasi dibutuhkan adalah mekanisme dalam hal ini adanya standar operasional atau pedoman organisasi yang mudah dipahami dan struktur organisasi (Nugroho, 2017).

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran masalah tersebut, maka penulis tertarik pada retribusi terminal sebagai obyek penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang timbul adalah:

1. Bagaimana perilaku hubungan organisasi dalam pelaksanaan kebijakan pengeloalaan sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong ?
2. Bagaimana implementor tingkat bawah dalam melaksanakan kebijakan pegelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong ?
3. Bagaimana perilaku suatu kelompok sasaran terhadap pelaksanaan kebijakan pegelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong ?
4. **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas bisa kita lihat yaitu tujuan dari penelitian yang saya buat ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Dinas Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besar nya pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Dinas Lingkungan Hidup.
3. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai manfaat positif dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

* + - 1. Manfaat Teoritis
         1. Mendukung teori yang disampaikan oleh Van Horn dan Van Meter yang dikutip oleh Wahab dalam (Mokodompis et al., 2019) tentang pengertian implementasi kebijakan, Sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efesien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan, 2016)
         2. Mendukung Penelitian ini oleh Yusrival (2022). Hardani Wijaya, Heru Nurasa. Elisa Susanti (2022). Salsabila Kosaza, Budi Setiyono, Wijayanto (2021)
         3. Tidak mendukung penelitian ini oleh Teguh Imam Fitroni (2018). Paramita Adhinul Putera (2016)
      2. Manfaat Praktik

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk masyarakat dan dapat memberikan gambaran mengenai peran pemerintah dan peran serta masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Penelitian Terdahulu**
   1. **Yusrival (2022) tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah (TPS) bukit asri kecamatan gantarang kabupaten bulukumba**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong secara umum telah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari 1. Perilaku hubungan organisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong telah dilakukan dengan mengadakan kerjasama, komitmen, dan koordinasi dengan Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba. 2. Perilaku implementor bawah juga telah melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu kontrol organisasi, etos kerja, dan profesionalitas kerja para pengelola TPS. 3. Perilaku kelompok sasaran yakni masyarakat memberikan respon positif dan mendukung dengan adanya pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Karna dianggap sangat membantu masyarakat perkotaan khususnya di daerah padat penduduk**.**
   2. **Hardani Wijaya, Heru Nurasa,** **Elisa Susanti (2022) tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Cimahi (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah).** Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Yaitu teknik purposive sampling.

Kota Cimahi (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah). Dari ketujuh faktor keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Michael Hill dan Peter Hupe terdapat faktor yang paling mempengaruhi belum efektifnya implementasi kebijakan kawasan pengelolaan sampah di Kota cimahi. Faktor tersebut adalah sikap pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi ini yang harus berperan aktif bersosialisasi agar masyarakatnya ikut berperan aktif contoh yang paling sederhana membuang sampah pada tempatnya tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya reward dan punishment yang diatur dengan jelas.

* 1. **Juriko Abdussamad, Fenti Prihatini Dance Tui, Fatmawati Mohamad, Swastiani Dunggio (2022) tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di dinas lingkungan hidup kabupaten bone bolango.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilihat dari beberapa aspek yaitu (a) aspek tanggung jawab, (b) aspek berkelanjutan, (c) aspek manfaat, (d) aspek nilai ekonomi. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango meliputi, tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, kinerja. Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango meliputi, aspek tanggung jawab, aspek berkelanjutan, aspek manfaat, aspek nilai ekonomi secara keseluruhan pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi belum efektif dilaksanakan, masih terdapat kendala seperti keterbatasan bangunan bank sampah, keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya penggajian, serta minimnya pengawasan pihak pemerintah terhadap bank sampah. (2) faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah yang meliputi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan kinerja. Secara keseluruhan faktor-faktor tersebut belum dilakukan dengan maksimal seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan dan perlunya peningkatan mengenai sarana dan prasarana, sehingga dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dari tujuan sistem bank sampah itu sendiri.
  2. **Salsabila Kosaza, Budi Setiyono, Wijayanto (2020) tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta**. kеbijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di TPS Kramat Jati belum sepenuhnya berjalan dengan baik, perlu dioptimalisasikan agar lebih efektif dan efisien. Tеrdapat 4 faktor yang turut mеmpengaruhi yakni faktor sumbеr daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 faktor tersebut telah dijalankan sеsuai dеngan tеori impelementasi kebijakan publik Gеorgе C. Edward III. Beberapa hambatan yang terjadi yaitu terkait luasan lahan TPS dan kеsadaran masyarakat dalam pеngelolaan sampah yang baik masih kurang.
  3. **Susanti Alfira Takaluhude, Ronny Gosal, Ventje Kasenda (2022) tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawang bendar Kecamatan Tahuna.** Jumlah sampah yang tidak terkontrol dan semakin banyak jumlah masyarakat yang semakin bertambah, namun tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan yang masih sangat kurang mengakibatkan ketidak seimbangan keadaan lingkungan. Kegiatan penanganan sampah belum mampu menangani semua sampah yang dihaliskan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tipe A adalah instansi teknis yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pengelolaan sampah yaitu di Bidang Persampahan. Dengan metode penelitian kualitatif.Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi. Dengan menggunakan teori implementasi dari George Edward III dalam Widodo ( 2010 : 96 ), terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna, belum terlaksana secara optimal.Komunikasi yang dilakukan belum optimal, sumber daya manusia maupun anggaran masih terbatas, disposisi adanya ketidak serasian anatara pelaksanaan program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dengan yang ada di Keluarahan. Namun struktur birokrasinya terkoordinasi dengan baik sesuaidengan standar operasional prosedurnya ( SOP ) yang ada.

1. **Kerangka Teori**
   1. **Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan, Implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Upaya untuk memahami adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan fakta yang telah terjadi sehingga menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suatu pelaksanaan. Ini membutuhkan pelaksana yang benar – benar jujur, untuk menghasilkan apa yang telah menjadi tujuan dan benar – benar memperhatikan rambu – rambu peraturan pemerintah yang berlaku.

Implementasi menurut Riant Nugroho pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang di inginkan (Nugroho, 2003:158). Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah di rumuskan. Implementasi merupakan tindakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2010:65) menjelaskan makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha - usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi berasal dari istilah bahasa Inggris “to implement”, yang artinya pelaksanaan dan penerapan (Adiwisastra dalam Aripin, 2009).

Implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang – undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau di implementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang di inginkan. Implementasi adalah sebuah program atau sebuah kebijakan untuk perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif. Seperti halnya kebijaksanaan yang terlihat bagus di atas kertas namun sulit merumuskannya dalam kata - kata dan selogan - selogan Implementasi kebijakan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman (2002: 70), implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan (2004: 39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

* 1. **Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Budiarjo (2018: 20) menyatakan kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (*public policy, beleid*), menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah.

Kebijakan adalah suatu keputusan yang mencerminkan sikap suatu organisasi terhadap suatu persoalan yang telah, sedang, atau akan dihadapi. Organisasi yang dimaksud meliputi organisasi pemerintah dan swasta, kebijakan adalah keputusan yang hanya berlaku di wilayah Internal organisasi pemerintah (aparatur) atau organisasi swasta (karyawan) (Sinaga, 2013: 55).

Ciri khas kebijakan umum (keputusan politik pada umumnya) sebagai produk tindakan pemerintah ialah sifatnya yang mengikat, dalam arti pelaksanaannya ditegakkan dengan kewenangan memaksakan secara fisik yang dimonopoli oleh pemerintah. Keempat kebijakan umum adalah (Surbakti, 2010: 246):

* 1. Kebijakan regulatif

Kebijakan regulatif terjadi apabila kebijakan mengandung paksaan dan akan diterapkan secara langsung terhadap individu. Biasanya kebijakan regulatif dibuat untuk mencegah agar individu tidak melakukan suatu tindakan yang tak diperbolehkan, seperti undang-undang hukum pidana, undang-undang anti monopoli dan kompetisi yang tak sehat, dan berbagai ketentuan yang menyangkut keselamatan umum. Dalam hal ini, pengawasan obat dan makanan serta keselamatan kerja. Selain itu, kebijakan regulatif dibuat untuk memaksakan agar individu melakukan suatu tindakan hingga kepentingan umum tidak terganggu seperti berbagai bentuk perizinan dalam menggunakan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public goals*).

* 1. Kebijakan redistributif

Kebijakan redistributif ditandai dengan adanya paksaan secara langsung kepada warga negara, tetapi penerapannya melalui lingkungan. Pengenaan pajak secara progresif kepada sejumlah orang yang termasuk kategori wajib pajak untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui berbagai program pemerintah merupakan inti kebijakan redistributif. Hasil penerapan undang-undang pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak bumi,dan bangunan, pajak atas keuntungan dan bunga tabungan, dan iuran listrik, yang digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit merupakan contoh kebijakan redistributif. Retribusi seperti tiket parkir bukan kebijakan redistributif karena ia dikenakan secara sama kepada setiap orang yang menggunakan fasilitas umum.

* 1. Kebijakan distributif

Kebijakan distributif ditandai dengan pengenaan paksaan secara tidak langsung (kemungkinan pengenaan paksaan fisik sangat jauh), tetapi kebijakan itu diterapkan secara langsung terhadap individu. Individu dapat menarik manfaat dari kebijakan itu, walaupun tidak dikenakan paksaan kepada individu untuk menggunakannya. Dalam pengertian yang lebih konkert, kebijakan distributif berarti penggunaan anggaran belanja negara atau daerah untuk memberikan manfaat secara langsung kepada individu, seperti pendidikan dasar yang bebas biaya, subsidi kepada sekolah lanjutan dan perguruan tinggi negeri, subsidi energi bahan bakar minyak, subsidi sarana produksi pertanian, pelayanan kesehatan, fasilitas jalan raya, dan pemberian hak paten kepada individu yang berhasi menemukan sesuatu yang baru.

* 1. Kebijakan konstituen

Kebijakan konstituen ditandai dengan kemungkinan pengenaan paksaan fisik yang sangat jauh dan penerapan kebijakan itu secara tidak langsung melalui lingkungan. Walaupun tipe ke empat ini merupakan konsekuensi logis dari tipe ke tiga sebelumnya, sebenarnya tipe ini merupakan kategori sisa (residual category) yang mencakup tipe-tipe lain yang tidak dapat dimasukkan kedalam tipe ketiga sebelumnya. Kebijakan konstituen mencakup dua lingkup bidang garapan, yaitu urusan keamanan nasional dan luar negeri, dan berbagai dinas pelayanan administrasi. Yang pertama mencakup pertahanan dan keamanan, badan intelijen, ketertiban umum, diplomasi dan penerangan luar negeri dari kementerian luar negeri. Yang kedua lebih bersifat pelayanan kepada pemerintah daripada kepada bangsa, seperti lembaga administrasi negara, badan administrasi kepegawaian negara, percetakan negara, biro statistik, pengkajian dan penerapan teknologi, dan pemetaan nasional.

Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut (Sinaga, 2013: 59):

1. Penyusunan agenda

Para pengambil kebijakan (eksekutif, legislatif) menginventarisir persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Dari berbagai persoalan yang telah di inventasrisir maka akan dilihat mana persoalan yang dapat di tempatkan sebagai prioritas untuk diselesaikan. Sehingga tidak semua persoalan yang ada (telah diinventarisir) dapat dijadikan sebagai sebuah persoalan yang akan di tindak lanjuti melainkan akan di tunda, dan mendahulukan persoalan yang dianggap prioritas.

1. Formulasi kebijakan

Pada tahap ini, persoalan yang telah disepakati sebagai prioritas yang harus di selesaikan kemudian dibahas bersama dengan pencarian pemecahan masalah. Dalam situasi ini banyak alternatif pemecahan masalah di paparkan dan bisa dikatakan berbagai alternatif pemecahan masalah yang terbaik.

1. Adopsi kebijakan

Dari berbagai alternatif pemecahan masalah (solusi) yang ditawarkan pada tahap formulasi kebijakan maka pada tahap ini pengambilan kebijakan harus memilih satu alternatif pemecahan masalah dari yang tersedia. Dan alternatif inilah satu-satunya sebagai alternatif yang akan diadopsi sebagai alternatif pemecah masalah berupa kebijakan.

1. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diadopsi kemudian diimplementasikan. Inmplementasi kebijakan akan menjadi efektif kepada warga negara apabila kebijakan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga negara sehingga warga negara mengetahui secara pasti bahwa kebijakan tersebut sungguh benar atau sah keberadaannya.

1. Evaluasi kebijakan

Setelah kebijakan diimplementasikan, pada tahap ini harus diikuti dengan tahap monitoring agar perkembangan kebijakan dapat diketahui, dalam arti kebijakan tersebut bisa diterima oleh mayoritas warga negara atau tidak diterima oleh mayoritas warga negara.

1. **Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi merupakan suatu proses yang cepat dan tepat bergerak, dimana pelaksanaan kebijakan ini melalui aktivitas atau kegiatan yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan di setujui, langkah selanjutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya policy maker dengan tujuan mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar mampu memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2010: 87).

Implementasi menurut Jones (2016: 61) adalah suatu proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya, sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter adalah tindakan yang dilakukan pemerintah. Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan di tetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri.

Menurut Mulyadi (2016: 45) proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal merupakan kebijakan yang diimplementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan adalah kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas dan ketetapan strategi implementasi.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat dicapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering di istilahkan sebagai peraturan pelaksana. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain keppers, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lain-lain (Nugroho, 2017: 674).

Implementasi kebijakan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Karena implementasi kebijakan adalah proses dimana kebijakan yang telah dibuat akan dijalankan. Jika tidak ada implementasi maka akan sia-sia kebijakan yang telah dibuat karena kebijakan tersebut tidak pernah terealisasikan dan tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan (*output*). Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain didalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit (Wibawa, 2014: 67).

1. **Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017**

Sampah merupakan suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan Amerika membuat batasan sampah (*waste*) adalah suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Soekodjo, 2011).

Dalam Perda Nomor 14 tahun 2017 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Sampah residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi. Sampah komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Tujuan pengaturan pengelolaan sampah menurut Perda Nomor 14 tahun 2017 adalah:

1. Mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat bagi seluruh masyarakat.
2. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dan bersih di semua kawasan.
3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan.
5. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis.
6. Mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Tugas pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

1. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
2. Mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah.
3. Melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah.
4. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
5. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
6. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
7. Mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengelolaan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah.
8. Mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong, setiap orang wajib menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya, turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah, menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan dan dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW, dan/atau desa/kelurahan/kecamatan dengan pembinaan teknis dari SKPD yang membidangi persampahan. Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

1. **Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III**

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. (dalam Agustino, 2008 : 149-154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu : 1. Komunikasi ( Comunication ), 2. Sumberdaya ( Resources ), 3. Disposisi ( Dispositions ), dan 4. Struktur birokrasi ( Bureaucratic structure ),

* 1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2008 : 150) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan impelementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

* 1. Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino, 2008:151-152). Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

* 1. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan dalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak ompoten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
  2. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
  3. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
  4. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
  5. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino, 2008:152-154), adalah :

* + 1. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
    2. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interst) atau organisasi.
  1. Struktur birokrasi

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2008: 153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi  tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

* 1. Standar Operating Prosedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.
  2. Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

1. **Aspek Sumber Daya**

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Menurut Hodge (2016: 14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: ”*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*”. Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: “*Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc*”. Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: “*Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc*”. Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: ”*Financial resources-cash on hand, debt financing, owner`s investment, sale reveue, etc*”. Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: “*Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc*”.

Menurut Edward III dalam Agustino (2016: 158), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

* 1. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

* 1. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

* 1. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

* 1. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Edward III dalam Agustino (2016: 159), mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang  
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III  
menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”.

1. Sumber daya Anggaran

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi  
keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa  
dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan  
disposisi para pelaku kebijakan rendah.

1. Sumber daya Peralatan

Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk  
operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi  
gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan  
dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

1. Sumber daya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan  
sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi  
lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan  
ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah  
dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu  
keputusan. Pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang  
yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

**C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai hal yang penting, dengan demikian kerangka konseptual adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar menjadi pondasi bagi setiap pemikir atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan (Sugiono, 2009:60)

Implementasi kebijakan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Karena implementasi kebijakan adalah proses dimana kebijakan yang telah dibuat akan dijalankan. Jika tidak ada implementasi maka akan sia-sia kebijakan yang telah dibuat karena kebijakan tersebut tidak pernah terealisasikan dan tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan (*output*). Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah memberikan definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Sampah residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi. Sampah komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Keberhasilan implementasi kebijakan peraturan daerah harus didukung oleh sumberdaya yang memadai. Komponen sumberdaya ini terdiri dari jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

* + - 1. Kerangka Konseptual

Model Implementasi Perda no.14 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah

1. Staf
2. Informasi
3. Wewenang
4. Fasilitas

Indikator Sumber Daya

1. Sumber daya manusia
2. Ketersediaan Anggaran
3. Ketersediaan Peralatan
4. Btasan Kewenangan

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

|  |
| --- |
| Terimplementasi |

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan dengan keadaan yang terjadi sebenarnya. Sehingga dapat melihat permasalahan apa saja yang terjadi pada pegawai dalam mengelola sampah, khususnya perkantoran dan sampah rumah tangga. Maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi ataupun masukan dalam mengelola sampah kantor dan rumah tangga yang terpadu dan berkesinambungan.

Dengan menggunakan teori diatas maka peneliti dapat melihat bagaimana perilaku hubungan antar organisasi, perilaku implementor tingkat bawah dan perilaku kelompok sasaran. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut maka diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

1. Deskripsi fokus penelitian

Berdasarkan kerangka Konseptual peneliti diatas, adapun yang menjadi fokus penelitian tentang Implementasi kebijakan pengelolaan sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong yaitu menggunakan model implementasi kebijakan dari Soren C Winter yaitu :

* 1. Perilaku hubungan antar organisasi :

Hubungan antar organisasi yang baik dan saling menguntungkan seharusnya terdapat Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sehingga dalam penerapan dan pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah ini diharapkan mencapai hasil yang maksimal. Hubungan organisasi ini dapat dilihat dari 2 aspek yaitu komitmen dan koordinasi antar organisasi. Yang dimana komitmen dan koordinasi organisasi begitu penting dalam proses kerja sama antar orgaisasi seehingga dalam merealisasikan kebijakan pengelolaan sampah ini dapat mencapai pada titik optimal.

* 1. Perilaku implementor tingkat bawah :

Implementor kebijakan pengelolaan sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong seharusnya mempunyai sikap profesioanal dalam bekerja dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan pengolahan sampah.

Implementor tingkat bawah menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan karna posisinya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Implementor haruslah bekerja dengan etos kerja yang tinggi dan mengedepankan sikap profesionalitas dalam bekerja. Serta Implementor tingkat bawah haruslah paham dan peka terhadap masalah maupun fenomena yang terjadi di masyarakat sehingga dapat menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut. Dan dalam mengatasi permasalahan yang ada implementor tingkat bawah ini haruslah mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan sampah yang baik dan benar.

* 1. Perilaku kelompok sasaran

Kelompok sasaran yang meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang dibuat Kelompok sasaran yaitu masyarakat seharusnya memberikan respon positif dan mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sehingga dapat diartikan kebijakan atau program pengelolaan sampah telah terlaksana dan diterapkan dengan baik oleh implementor tingkat bawah. Dan jika kebijakan itu mendapatkan respon negatif serta menimbulkan kegaduhan di masyarakat maka kebijakan tersebut haruslah dievaluasi secepatnya.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Pendekatan dan jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, menurut Moleong (2012: 6) ialah jenis penelitian yang berupaya mengambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata, dan gambar. Sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut sugiyono (2017 , hlm. 8) menyatakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalis kerana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.

1. **Informan**

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu peneliti. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap mengetahui tentang apa yang menjadi rumusan masalah peneliti, atau mungkin informan tersebut sebagai penguasa, pemilik, ketua ataupun sebagainya sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek, situasi sosial, serta keadaan sesuatu yang ingin diteliti.

Informan yang dimaksud yaitu informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Ketua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, Devisi Oprasional, Kepala Dusun Puri Asri, dan yang paling penting masyarakat penerima manfaat. Alasan peneliti memilih informan tersebut agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih spesifik tentang keadaan yang terjadi sebenarnya. Dan dalam memilih informan harus memiliki sifat yang jujur, independen serta mengetahui permasalahan dari sebuah penelitian.

Tabel 3.1 Data Informan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | ALASAN |
| 1 | Slamet Riyadi | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Karena mengetahui, tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong |
| 2 | Muhammad Ramadhani,S.si | KABID Persampahan Dinas Lingkungan Hidup | Karena mengetahui tentang perjanjian kerja sama dengan dinas terkait |
| 3 | Siti Sarifah,SE | KASUBAG Persampaham Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Karena mengetahui hambatan dalam pengelolaan sampah |
| 4 | Akhmad Romadhani | Masyarakat | Untuk mengetahui respon terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong |
| 5 | Siti aminah | Masyarakat | Untuk mengetahui respon terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong |

1. **Sumber data**

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam bukunya Moleong (2014: 157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberi data kepada pengumpul data (sugiyono: 2017 : 104). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.

1. Data Sekunder

Sugiyono (2016: 225) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.

1. **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling stategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2016: 224). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017 : 104)

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pernyataan dan yang diwawancarai (interviewee) yang emberikan jawaban atas pernyataan dan yang telah diberikan diberikan (Moleong 2014:186). Metode wawancara Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang paling independen terhadap semua teknik pengumpulan data adalah: wawancara (*interview*), observasi atau pengamatan langsung dan dokumentasi.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan namun dapat berkembang dan lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informan. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2016: 233). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan informan, mengenai data kondisi Desa Madang.

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2010). Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi sangat dibutuhkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014: 174) menyatakan salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, dimana pada pelaksanaannya peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen. Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan di Desa Madang dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang terjadi di Desa Madang upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan.

1. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, skesta dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016: 240).

Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari Kepala Desa berupa data, foto, laporan kegiatan, atau segala bentuk dokumentasi yang merekam aktivitas di Desa Madang sebagai upaya meningkatkan partisipasi perempuan pada kegiatan keterampilan.

1. **Analisis Data**

Sugiyono (2016: 244) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992: 15). Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita, rekaman biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis (Miles dan Huberman, 1992: 15).

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2016: 247).

1. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016: 249).

1. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi serta diuji validitasnya. Untuk memperjelas, berikut gambar analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman.

Gambar 3.1. Komponen Analisis Data: Model Interaktif Miles dan Huberman

Sumber : Data diolah, 2023.

1. **Jadwal Penelitian**

Penyelesaian pembuatan Proposal ini dimulai dari penyiapan judul proposal dengan konsultasi jurnal dan oengajuan judul proposal skripsi kepada dosen pembimbing, pengumpulan bahan referensi pada Bulan mei dilanjutkan dengan pengetikan. Pada Bulan juni dilanjutkan bimbingan proposal dan konsultasi untuk seminar proposal.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Legenda tentang terciptanya nama Tabalong menurut hikayat lisan dari mulut ke mulut yang tersebar sejak tahun empat puluhan, ialah seperti yang di tulis seniman Tabalong dalam buku antologi puisi ” Duri duri Tataba ” tahun 1996 yang di terbitkan Dewan Kesenian Daerah (DKD) Tabalong, menyebutkan bahwa terwujudnya sebutan Tabalong yaitu bermula dari para perambah hutan yang mencari ladang dan huma hingga kakinya terinjak duri - duri Tataba sejenis pohon yang seluruh batangya penuh berduri keras, jenis tanaman ini mempunyai akar Tunjang dan berbuah hanya menjadi makanan burung-burung hutan. Mereka menjerit (dalam bahasa Banjar Hulu, dikatakan ” Jerit ” sama dengan Tahalulung atau sama dengan melolong), karena kesakitan terkena duri-duri Tataba, inilah akhirnya menjadi penyebutan ” TABALONG “. Artinya terinjak duri Tataba…..jadi Tahalulung menjadi nama …” Tabalong “.

Pada tanggal 15 Maret 1958, atas permufakatan orang-orang terkemuka di Tanjung, yang di prakarsai oleh Bapak Baharuddin Akhmid yang waktu itu menjabat Asisten Wedana di Kecamatan Tabalong Selatan, maka di bentuklah Panitia sementara Penuntutan Daerah Swatantra Tingkat II Tabalong yang di susun kepengurusannyasebagai berikut:

**Penasehat :** Baharuddin Akhmid

**Ketua :** Juhri

**Wakil Ketua :** A. Salman

**Sekretaris :** Usnan. As

**Wakil Sekretaris :** Abdullah Khairul

**Bendahara :** H. Baderi

**Pembantu Umum :** As,ad

**Anggota-anggota :** A. Syamsi, H. A. Sudani, M. Salman

Setelah Panitia Sementara terbentuk , untuk kepentingan perjuangan serta terjadinya beberapa mutasi terhadap Pegawai Negeri yang sudah duduk dalam kepanitian, maka komposisi dan personalia panitia penuntut mengalami beberapa kali perubahan hingga sampai pada Panitia V, di mana orang-orang yang mempunyai andil besar dan pernah menjadi Panitia Penuntut adalah sebagai berikut :

* + 1. Abdussyukur
    2. Amir Hasan
    3. A. Sajeli
    4. Basuni Ulita
    5. A. Husaini
    6. Juhrani
    7. Majedi Effendi
    8. Abdurahman Hamud
    9. H. Baderi
    10. H. Juhri Taher
    11. H. Alikurdi Almas
    12. Kadirman
    13. H. Abdul Gani
    14. Syahrap
    15. H. Kurdi
    16. Yahya. Z
    17. H. Imansyah
    18. Hiskia Tiro
    19. H. Basuni (Kepala Desa)
    20. Idar
    21. Masran

Tak luput pula peran mass media dan RRI Banjarmasin selalu menginformasikan segala kegiatan masyarakat Tabalong, dengan kekompakkan perjuangan Panitia dalam segala bidang , akhirnya pada tanggal 5 Mei 1959 dalam sidang Pleno terbuka DPRD Hulu Sungai Utara telah memutuskan menyetujui sepenuhnya tuntutan rakyat Tabalong agar Kewedanaan Tabalong dapat di jadikan Daerah Swatantra Tingkat II Tabalong dengan ibukota Tanjung, yang terkenal dengan resolusi tanggal 5 Mei 1959 Nomor . 2/II DPRD -1959, yang isinya selain menyetujui juga mendesak Pemerintah Pusat agar tuntutan dimaksud dapat dikabulkan.

Perjuangan kearah yang di inginkan terlihat adanya titik terang, langkah semakin jelas, maka di perkuat lagi kedudukan Panitia untuk melancarkan arus perjuangan, maka Panitia sebelumnya di sempurnakan lagi dengan Panitia VI sebagai berikut :

**Ketua Umum :** Juhri

**Ketua I :** M. Salman

**Ketua II :** Maslan

**Penulis I :** Usnan. As

**Penulis II :** Abdullah

**Bendahara :** Norbek

**Pembantu-pembantu :** Semua Camat Dalam Kewedanaan Tabalong, Semua Anggota DPRD Hulu Sungai Utara yang tinggal di Kewedanaan Tabalong.

**Seksi Politik :** H. Baijuri Y, Ruminto dkk

**Seksi Bangunan :** Anang Basar, Donarian dkk

**Seksi Perencanaan :** Abdurrahman Projakal dkk

**Seksi Penerangan :** A. Syamsi, Hamidhan Baseri

**Seksi Organisasi :** Makmod Asnawi, Hamad dkk

Panitia ini telah berusaha dengan sekuat tenaga dan dana uang ada, mengadakan hubungan dengan pihak Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dengan DPRD GR-nya, serta Tokoh-tokoh politik dan Ormas yang di wakili dalam DPRD- GR Propinsi Kalimantan Selatan , agar dapat dukungan dari mereka atas tuntutan ini.

Dari adanya kegiatan tersebut serta kerja sama yang harmonis, maka dalam sidang istimewa DPRD-GR Kalimantan Selatan telah menyetujui tuntutan rakyat Tabalong, Tapin, dan Tanah Laut masing-masing dijadikan Daerah Swantantra Tingkat II.

DPRD-GR Propinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Resolusi yang di tujukan ke Pemerintah Pusat, memohon Pemerintah Pusat dapat menyetujui dan selanjutnya melahirkan Daerah Tingkat II.

Panitia dalam usahanya memperjuangkan ketingkat Pusat telah menghubungi Gubernur Kalimantan Selatan (waktu itu) Bapak Haji Maksid, untuk memohon nasehat dan petunjuk serta do’a restu untuk berangkat ke Jakarta oleh Bapak Gubernur di berikan Petunjuk-petunjuk dan sekaligus merestui keberangkatan Panitia menemui Bapak Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sertya Pejabat-pejabat Tinggi lainnya guna menyampaikan hasrat Rakyat Tabalong di maksud.

Berangkatlah Saudara Juhri dan Usman. As masing-masing selaku ketua Umum dan sekretaris Panitia dan pula oleh Bapak Muhyar Usman selaku wakil dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.

Dalam waktu yang relatif singkat , rombongan Panitia telah dapat di terima    oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Bapak IPIK Gandamana dalam percakapan akhir beliau mengatakan, bahwa pada prinsipnya saya dapat menyetujui tuntutan ini dan akan di ajukan pada Sidang DPR-GR yang akan datang.

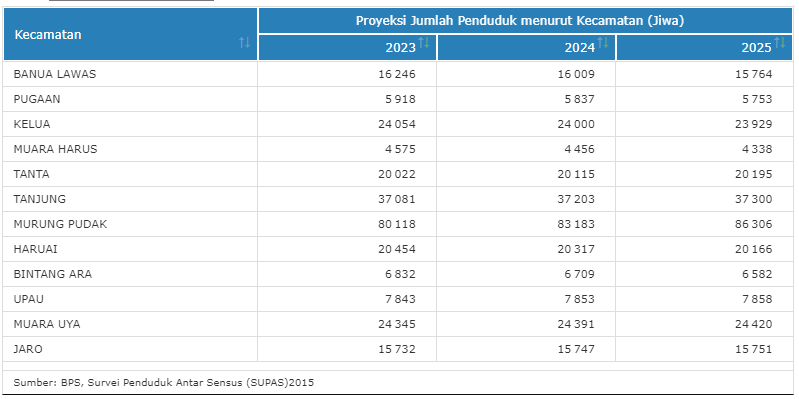
Sebagai realisasi dari kunjungan Panitia, oleh DPR-GR telah mengutus ketua Komisi ” B ” yaitu Bapak I.S. HandokoWijoyo untuk meninjau ketiga calon Daerah Tingkat II dimaksud , dalam kunjungan ke Tabalong Bapak I.S. Handoko Wijoyo mengatakan ” Tidak ada alasan untuk tidak menyetujui tuntutan Rakyat Tabalong ini.

Perjuangan kita telah meningkat lebih jauh , dimana pada tanggal 5 September 1964 Kewadenaan Tabalong telah di tingkatkan statusnya menjadi Daerah Persiapan Tingkat II Tabalong dengan Kepala Kantornya Bapak Usman Dundrung Bekas Wedana Barabai.

Lahirnya Undang-undang Noor 8 Tahun 1965 Tanggal 14 juni 1965, yang mendorong daerah pesiapan Tingkat II Tabalong ini di tingkatkan lagi menjadi Daerah Otonomi Tingkat II Tabalong, yang menjalankan roda Pemerintahan sendiri baik eksekutif maupun Legislatif dan untuk ini juga Pemerintah tetap di percayakan kepada Bapak Usman Dundrung.

Pada tanggal 1 desember 1965 jam 11.00 pagi bertempat di lapangan ” GIAT ” Tanjung oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Bapak Dr. Soemarno Sosro Atmodjo dengan di saksikan puluhan ribu rakyat Tabalong dan Pejabat-pejabat tinggi Kalimantan Selatan lainnya, maka papan nama yang di selubungi kain bledru hijau dengan untaian sutra kuning keemasan, telah di buka dengan resmi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan di balik selubung yang terbuka itu terpampang kalimat yang bersenjata yang berbunyi **“DAERAH TINGKAT II TABALONG DIRESMIKAN 1 DESEMBER 1965″**.

4.1 Tabel jumlah penduduk Kabupaten Tabalong



1. **Hasil Penelitian**
2. Model Implementasi

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. (dalam Agustino, 2008 : 149-154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan.

Berbicara tentang implementasi peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa:

* 1. Menurut bapa bagaimana komunikasi antar pegawai yang ada pada dinas dalam mengambil kebijakan untuk mengelola sampah dengan baik ?

*“pegawai yang ada disini itu memang sudah sesuai aturan itu ada dikelola oleh pihak SDM berkaitan dengan itu komunikasi kami antar pegawai di antaranya adalah setiap pagi itu melakukan apel, disitu kita arahkan bagaimana supaya pelaksanaan kegiatan setiap harinya berjalan dengn lancar dengan pengarahan awal sebelum melakukan pekerjaan, kemudian juga ada beberapa rapat dalam hal ini dilakukan oleh beberapa bidang kemudian juga untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik itu sudah ada SOP nya dari bidang persampahan itu sdah membuat kebijakan bagaimana mengelola sampah dengan baik diantaranya itu titik lokasi yang ada disana yaitu TPS3R, bang sampah, dan ada TPA.”*

* 1. Menurut bapa dalam pengemplementasian kebijakan pengelolaan sampah ini sumber daya yang ada pada dinas lingkungn hidup kab. Tabalong apakah sudah memadai dan apkah sudah meningkat dalam tiap tahun dalam pelaksanaannya ?

*“untuk kebijakan pengelolaan sampah dan sumber daya relatif karna sampah yang dihasilkan oleh kabupaten tabalong ini awalnya itu di TPA itu hendak mengelola 4 kecamatan kenyataannya TPA saat ini mengelola kumpulan sampah ada 12 kecamatan untuk itu SDM nya saat ini harusya bertambah karna timbunan sampah yang dihasilkan sudah bertambah kemudian juga sarana prasarana angkutan harusnya juga kita tambah mengingat angkutan saraana prasaran yang ada ini sudah lama/memang sudah berumur sehingga setiap tahunnya harusnya ada peningkatan tapi untuk tahun ini 2022 dan 2023 itu tidak ada penambahan untuk peningkatan sarana prasarana juga tambahan untuk personil itu juga berkurang.”*

* 1. Menrut bapa bagaimanakah jabatan atau posisi yang ada dalam dinas lingkungan hidup, apakah sudah sesuai dengan kemapuan yang diimiliki oleh pegawainya ?

*“jabatan yang ada di dinas lingkungan hidup ini ada beberapa pegawai di antaranya adalah yang mengurus persampahan itu sesuai di BKPDSM itu sudah jelaas sudah ada orangnya dan sudah menduduki posisi masing2 jadi terkait dengan jabaatan yang ada di DLH ini sudah sesuai atau sudah sesuai kreterianya artinnya sudah dilakukan pengangkaatan jabatan oleh bupati kemudian juga untuk staf2nya saat ini juga sudah sesuai namun memang untuk tenaga administrasi masih kurang untuk membantu d bawah kasi atau di kabidnya dalam hal ini untuk pemenuhan pegawainya DLH sudah babrapa kali mengajukan ke BKPDSM namun karna formassinya memang belum terpenuhi untuk tahin ini tidak ada penambahan pegawai.”*

* 1. Menerut bapa struktur birokrasi yang ada di dinas Lingkungan Hidup ini apakah sudah baik dan sesuai pelaksanaannya dan penerapannya baik itu dalam SOP kerja dan tanggung jawab dari pegawainya dalam bekerja ?

*“karena struktur birokrasi ini sudah mengacu kepada SOTK pemerintah daerah seharusnya itu sudah sesuai, kemudian juga penerapan SOP itu sudah sesuai kreteria yang di tentukan kenapa karena bagaimanpun itu juga tentang struktur organisasi itu sudah di tentukan melalui perda jadi sudah sesuai dan tanggung jawab masing2 pegawainya relatif artinya memang harus selalu dibina dalam hal ini binaan terhadap pegawai yang ada di dinas Lingkungn hidup ini setiap tahunnya.”*

Pada wawancara kedua saya memilih informan dari KABID Persampahan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Tabalong yang mengatakan bahwa:

* 1. Menurut bapa bagaimana komunikasi antar pegawai yang ada pada dinas dalam mengambil kebijakan untuk mengelola sampah dengan baik ?

*“jadi memang ada beberapa hal yang penting dalam keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan termasuk di DLH dan pemerintah umum lainnya salah satunya adalah komunikasi yang baik jadi memang komunikasi ini tidak berjalan dengan baik disuatu SKPD atau pemerintah daerah tentu untuk mencapai tujuan itu sangat sulit tak terlepas dari komunikasi kita antar pegawai pada DLH untuk mengambil kebijakan mengelola sampah dengan baik, pengelolaan sampah ini secara produk hukum itu ada peraturan daerahnya no 14 tahun2017 tentang pengolalaan sampah terus bagaimana komunikasi dalam mengelola sampah khususnya di DLH yang jelas komunikasinya itu berjalan dengan baik walaupun di DLH ini ada 4 bidang yang mana topoksinya itu berbeda2 tapi untuk pengelolaan sampah domestik yang dikelola oleh DLH itu masing2 bidang sudah mengetahui bagaimana tata cara mengelola sampah, bagaimana cara menangani sampah sehingga pada jumat pertama setiap bulannya DLH itu melaksankan kegiatan bersih2 kemudian pengumpulan sampah daari rumah kemudian mengumpulkannya diDLH dan kemudian bersama2 menabung sampah yang terpilah di rumah dan dikantor kebank sampah kemudian juga kita mengolah sampah orrganik yang ada di dinas kita sendiri sampah organik yang di hasilkan oleh tanaman dan daari bidang2 lain itu kita kelola di lubang sampah organik yang dibangun oleh DLH itu sendiri nah begitu lah komunikasi antar pegawai itu mengola sampah di skala kantor.”*

* 1. Menurut bapa dalam pengemplementasian kebijakan pengelolaan sampah ini sumber daya yang ada pada dinas lingkungn hidup kab. Tabalong apakah sudah memadai dan apkah sudah meningkat dalam tiap tahun dalam pelaksanaannya ?

*“dalam hal sumber daya yang ada di SKPD untuk melakukan pengelolaan sampah skala kabupaten yang mana tugas DLH ini salah satunya bidang pengelolaan sampah ini adalah mengelola sampah dikabupaten mengelola ini ada 2 yaitu pengurangan sampah dan ada penanganan sampah dalam hal sumber daya manusia dalalm hal pengelolaan sampah sumber daya manusia tidak hanya beerpatokan pada DLH pengelolaan sampah itu khusus dilaksankan oleh masyaarakt kabupaten tabalong dalam hal ini masyarakat itu sendiri di setiap rumah yang kedua di organisasi oleh sampah yang ke3 TPS3R selanjutnya adalah penanganan sampah itu kita punya ratusan tenga kebersihan dari kebersihan jalan, pengankutan smpah sopir mengangkut sampah kebersihan pasar pengelolaan TPS dan yang terakhir adalah pengolahan di TPA nah semua sumber daya manusianya itu saya rasa masih cukup untuk mampu menangani lebih dari 50% sampah yang ada di kab tabalong baik dari segi sumber daya manusia kemudian sumber daya anggaran dan sumber daya sarana prasarana itu masih mencukupi dan alhamdulilah dengan dukungan dari pemerintah daerah dan APD dan DPRD kab tabalong anggaran untuk pengelolaan sampah di tabalong itu relatif semakin meningkat setiap tahunnya.”*

* 1. Menrut bapa bagaimanakah jabatan atau posisi yang ada dalam dinas lingkungan hidup, apakah sudah sesuai dengan kemapuan yang diimiliki oleh pegawainya ?

*“baik ini sumber daya manusia khusus dalam hal management, management pengelolaan sampah dalam hal ini adalah segi perencanaan , pelaksanaan dan penganggaran memang kalau dari segi jumlah DLH itu sangat terbatas jumlahnya walaupun dari segi kuantitas banyak akan tetapi kuatitas banyak itu masih di dominasi oleh tenaga ASN yang bekerja di lapangan masih ada yang menyapu jalan, ada yang pengangkut sampah, spir truk dan pengwas sedangkan sumber daya manusia yng ada dalam management selevel sarjana kemudian d3 maupun s2 itu sangat terbatas dan dari segi kemampuan yang dimiliki ini masing2 ASN walaupun tidak sesuai pendidikannya rata2 mereka mampu beradaptasi jabatan yang mereka pegang contoh tidak semua yang ada di DLH ini dasarnya dari sh ada juga yang dari sosial dari ekonomi tapi semuanya mampu beradaptasi untuk menjalankan tugas masing2nya sehingga kemampuan mereka rata dalam hal management sdah cukup bagus .”*

* 1. Menurut bapa struktur birokrasi yang adda di dinas Lingkungan Hidup ini apakah sudah baik dan sesuai pelaksanaannya dan penerapannya baik itu dalam SOP kerja dan tanggung jawab dari pegawainya dalam bekerja ?

*“dari struktur birokrasi alhamdullilah sudah cukup baik karena kita mengacu dari pada peraturan menteri lingkukan hidup dan tentang SOTK dinas lingkungan hidup dan juga untuk pelaksanaan kegiatan kita mengacu pada permendagri 90 jadi karna kita sesuai dengan peraturan perundang undangan dari segi birokrasi baik dalam penerapan SOP sudah sesuai maka tanggung jawab pekerjanya itu sudah cukup baik”*

Pada wawancara Ketiga saya memilih informan dari KASUBAG Persampahan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Tabalong yang mengatakan bahwa:

* 1. Menurut ibu bagaimana komunikasi antar pegawai yang ada pada dinas dalam mengambil kebijakan untuk mengelola sampah dengan baik.

*“komunikasi kami ini baik antara atasan dan bawaan sudah baik itu melalui lisan ataupun surat surat tertulis”.*

* 1. Menurut dalam pengemplementasian kebijakan pengelolaan sampah ini sumber daya yang ada pada dinas lingkungn hidup kab. Tabalong apakah sudah memadai dan apkah sudah meningkat dalam tiap tahun dalam pelaksanaannya.

*“sudah memadai, dari jumlahnya kami sementara tetap dari tiap tahun ke tahun tapi dari segi kualitas atau dari segi managerial kami ada pelatihan tapi untuk di pelaksanaan langsung biasaya habis rekrutmen kita langsung mengadakan bimbingan dan pelatihan oleh pengawasnya dilapangan secara langsung itu untuk pegaawai kebersihan dilapangan seperti penyapu jalanan itu langsung diberi pelajaran oleh pengawas nya.”*

* 1. Menrut ibu bagaimanakah jabatan atau posisi yang ada dalam dinas lingkungan hidup, apakah sudah sesuai dengan kemapuan yang diimiliki oleh pegawainya.

*“kalau jabatan kami sudah sesuai dengan jabatan yang ada disini kalau dari pegawai pns atau asn kalaupun untuk kontrak itu posisinya adalah untuk dilapangan sesuai dengan kebutuhan umapanya kalau penyapuan jabatannya adalah penyapuan sedangkan sopir adalah sopir nah itu harus sesuai apabila tidak bisa menyetir berarti tidak diperbolehkan untuk menyetir, sedangkan untuk jabatan dipegawai negerinya sementara ini untuk jabatan struktural sudah terisi penuh sedangkan untuk staf masih ada yang kosong dan pengisiannya itu dari BKPSDM.”*

* 1. Menurut ibu struktur birokrasi yang ada di dinas Lingkungan Hidup ini apakah sudah baik dan sesuai pelaksanaannya dan penerapannya baik itu dalam SOP kerja dan tanggung jawab dari pegawainya dalam bekerja.

*“sudah jelas kepala dinas sekertaris dibawahnya lagi kabid terus ada kasi nah itu struktur organisasinya sudah baku sudah sesuai perbub bupati, kalau birokrasinya kita sudah sesuai dengan acuan SOP kita, ada pola kerja kita yang sudah tersusun didalam sop yang tersusun, contoh untuk orang pengaduan penabangan pohon itu sopnya bersurat ketempat kita setelah itu kita disposisi kebidang tata lingkungan terus langsung di tindak lanjuti oleh kasi setelah itu diteruskan oleh petugas itu salah satu contoh layanan di DLH karna di DLH ini tidak Cuma sampah yang diurus”*

Pada wawancara Keempat saya memilih informan dari kalangan masyarakat untuk mengetahui tibal balik yang di dapatkan oleh masyarakat dalam penerapan model implementasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, informan tersebut mengatakan bahwa:

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana komunikasi antar masyarakat dengan pegawai dinas lingkungan hidup apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.

*“baik untuk komunikasi saya rasa sudah baik keluhan dari masayarakat segera teratasi seperti pengangkutan sampah yang ada di sekitar masyararkat seperti sampah rumah tangga segera dilaksanankan untuk pengangkutan sampah itu sendiri.”*

1. Menurut Bapak/Ibu dalam pengemplementasian kebijakan pengelolaan sampah ini sumber daya yang ada di dinas lingkungan hidup Kabupaten Tabalong apaka sudah memadai dan apakah sudah meningkat dalam tiap tahun dalam pelaksanaannya.

*“meneurut saya sudah memadai pegawainya makin bertambah dari yang saya lihat, transportasi mereka selalu bertambah tiap tahunnya dan saya rasa harusnya sudah meningkat pelaksanaannya”.*

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah pelayanan dalam pegelolaan sampah yang ada dalam dinas lingkungan hidup, apakah sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawainya.

*“menurut saya pelayanan di dinas lingkungan hidup sudah sangat bagus keluhan dari masyarakat langsung di tanggapi oleh pegawainya walaupun tidak langsung terlaksana karena melihat dari kondisi terlebih dahulu, untuk kemampuan saya rasa sudah sangat sesuai dengan kemampuan pegawainya masing masing.”*

1. Menurut Bapak/Ibu pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai dinas lingkungan hidup tepat nya yang ada dilapangan apakah sudah baik dan sesuai pelaksanaannya dan penerapannya dari pegawai nya dalam bekerja.

*“dari pandangan saya sudah sangat baik dan sesuai dengan pelaksanaannya dan penerepannya dalam bekerja saya lihat pagi sampah sudah tidak ada lagi d depan rumah dalam artian mereka ceketan dalam bekerja dan mereka pun sangat ramah dan sopan dalam bekerja.”*

Pada wawancara kelima saya juga memilih informan dari kalangan masyarakat untuk mengetahui tibal balik yang di dapatkan oleh masyarakat dalam penerapan model implementasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, informan tersebut mengatakan bahwa:

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana komunikasi antar masyarakat dengan pegawai dinas lingkungan hidup apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.

*“menurut saya komunikasinya sudah berjalan dengan baik karena keluhan dari kita itu ditindak lanjuti oleh pegawai yang ada di dinas lingkungn hidup itu sendiri seperti permintaan tong sampah mereka langsung melaksankannya walaupun secara bertahap.”*

1. Menurut Bapak/Ibu dalam pengemplementasian kebijakan pengelolaan sampah ini sumber daya yang ada di dinas lingkungan hidup Kabupaten Tabalong apakah sudah memadai dan apakah sudah meningkat dalam tiap tahun dalam pelaksanaannya.

*“menurut saya pengimplementasian sumber dayanya sudah memadai dilihat dari keluhan masyarakat tentang sampah yang menumpuk sangat cepat diatasi oleh dinas lingkungan hidup dan saya rasa pelaksanaannya dalam mengelola sampah sudah meningkat yang dari awalnya di tempat kita tidak ada pengangkutan smpah sekarang sudah ada petugas yang mengangkut sampah.*

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah pelayanan dalam pegelolaan sampah yang ada dalam dinas lingkungan hidup, apakah sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawainya.

*“menurut saya pelayanan pengelolaan sampah sudah sangat sesuai karena hanya orang orang tertentu yang bisa dan mau untuk mengelola sampah tersebut tidak semua orang mau untuk mengelola sampah tersebut.”*

1. Menurut Bapak/Ibu pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai dinas lingkungan hidup tepat nya yang ada dilapangan apakah sudah baik dan sesuai pelaksanaannya dan penerapannya dari pegawai nya dalam bekerja.

*“menerut saya sudah baik tentu sudah sesuai dalam pelaksanannya tersebut dari pandangan saya ada yang mengambil sampah ada yang mengangkut sampah terus ada yang memilah sampah itu semua saya rasa sudah sangat baik.”*

1. Aspek sumber daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Menurut Hodge (2016: 14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: ”*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*”. Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: “*Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc*”. Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: “*Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc*”. Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: ”*Financial resources-cash on hand, debt financing, owner`s investment, sale reveue, etc*”. Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: “*Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc*”.

Pada aspek sumber daya ini peneliti melakukan wawancara pertama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa:

1. Menurut bapa bagaimana peran sumber daya manisia dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampag pada dinas lingkungan hidup kab. Tabalong apakah sudah cukup baik atau memang dirasa kurang karena kurangnya peranan sumber daya manusia.

*“untuk sumber daya manusia pengelolaan sampah di DLH ini didukung oleh masyarakat tidak serta merta hanya dari DLH saja, peranan penting masyarakat untuk pengelolaan sampah itu sangat di perlukan misal : sampah rumah tangga itu seharusnya di pilah dari rumah sehingga dari pihak LH itu hanya mengangkut sampah2 yang memang organik itu bisa di manfaatkan oleh penghasil sampah sendiri tidak, jadi tidak semuanya harus pemerintah itu yang mengelola smpah namun pada saat ini memang sumber daya yang ada di masyarakat ini memang belum sepenuhnya menyadari bagaimana tentang pengelolaan sampah yang baik artinya memang perlu pembinaan sekurang2 nya dinas LH itu melakukan sosialisasi bagaimana peranan pemerintah dan masyarakat itu saling berkabolarasi untuk mendukung lingkungan hidup di sekitarnya itu menjadi bersih jadi tetap harus ada partisipasi masyarakat kalau hanya mengandalkan pemerintah daerah itu tidak mungkin 100% terlaksana.”*

1. Menurut bapa bagaimana peran sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada dinas LH kab. Tabalong apakah sudah cukup aik atau memang dirasa kurang kerna rendahnya anggaran yang di dapat.

*“ini saya rasa juga relatif karena anggaran ini sudah di tentukan oleh pemerintah daerah anggaran itu terdiri dari untuk belanja pegawai ada belanja barang dan jasa dan ada belanja pemeliharaan terkait hal itu karna sifatnya ini adalah rutin saya rasa belanja untuk rutin pengelolaan sampah itu sudah cukup baik sedangkan untuk belanja pegawai itu karena tahun ini ada peningkatan tambahan penghasilan itu sudah mencukupi artinya untuk anggaran berikutnya itu bisa ditingkatkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana misal untuk pengadaan truk pengangkut sampah kemudian penambahan kendaraan roda 3 atau tosa, di masyarakat itu sebagai pengumpul ke TPS3R itu harus ada penambahan sarana roda 3 atau tosa.”*

1. Menurut bapa bagaimana peran sumber daya peralatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada dinas LH kab. Tabalong apakah sudah cukup memadai baik dalam pengelolaan sampah pada dinasnya dan penampungan sampah yang ada di masyarakat.

*“untuk sumber daya peralatan itu karena ada beberapa kendaraan yg sudah usianya tua itu memang perlu dilakukan perawatan untuk truk pengangkut itu ada 33 unit itu setiap unit itu pasti ada troble apakah itu bannya atau yang lain itu ada pemeliharaan yang harus di tanggung oleh DLH. Dalam hal ini untuk pengelolaan sampah ke penampungan masyrakat sekitat sudah kita bantu dalam hal pengangkutannya artinya masyarakat tinggal menaroh terus di kelola oleh masyarakat sendiri kemudian dari DLH akan mengambil sampah yang sudah terkumpul dan akan kita bawa ke TPA.”*

1. Menurut bapa apakah sumber daya kewenangan yang ada pada dinaas lingkungan hidup kab. Tabalong sudah baik dalam mengimplementasikan pengelolaan sampah.

*“untuk sumber daya kewenangan itu sesuai peraturan yang berlaku, DLH ini sudah bagus artinya ada beberapa kriteria ada pernah mendapatkan piagam penghargaan yaitu berupa nirwa cipta suatantra dan juga penghargaan adipura dalam ini sebagai wujud penghargaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang berhasil mengelola lingkugan hidup dari indikator tersebut itu sudah cukup baik pengelolaan di dinas lingkungan hidup, kemudian juga ttidak kalah pentingnya tingkat partisipasi masyarakat juga lumayan dalam tanda kutip ini artinya memang tidak semuanya masyarakat itu perduli dengan sampah tapi apa boleh buat negara berkembang dmana pun penglolaan sampah ini menjadi isu artinya masyarakat di himbau melalui pendidikan melelaui sosialisasi, melalui pembinaan untuk pengelolaan sampah yang lebih bagus dan menyadarkan dri masyarakat untuk memilah sampah di rumah.”*

Pada wawancara kedua saya memilih informan dari KABID Persampahan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Tabalong yang mengatakan bahwa:

1. Menurut bapa bagaimana peran sumber daya manisia dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampag pada dinas lingkungan hidup kab. Tabalong apakah sudah cukup baik atau memang dirasa kurang karena kurangnya peranan sumber daya manusia.

*“dalalm hal melakukan tugas pengelolaan sampah saya rasa sumber daya manusia dalam hal kuantitas itu sudah cukup yang perlu ditingkatkan adalah kualitasnya, kulalitas ini memang banyak petugas lapangan belum begitu banyak di tingkat management tadi, tapi saat Ini jumlah petugas management pun tidak bisa di katakan kurang cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan pengelolaan sampah tingkat kabupaten.”*

1. Menurut bapa bagaimana peran sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada dinas LH kab. Tabalong apakah sudah cukup aik atau memang dirasa kurang kerna rendahnya anggaran yang di dapat.

*“baik untuk anggaran di DLH khususnya dalam pengelolaan sampah itu saya rasa sudah cukup karena memang dukungan TAPD dan DPRD menginginkan pengelolaan sampah di kab. Tabalong semakin meningkat tiap tahunnya dukungan mereka pun semakin kuat apalagi dukkungan itu berbasis dari usulan masyarakat kemudian amanah undang2 tentu TAPD dan DPRD akan terus mendukung peningkatan anggaran pada dinas lingkungan hidup dalam bidang pengelolan sampah.”*

1. Menurut bapa bagaimana peran sumber daya peralatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada dinas LH kab. Tabalong apakah sudah cukup memadai baik dalam pengelolaan sampah pada dinasnya dan penampungan sampah yang ada di masyarakat.

*“baik dari segi peralatan yang ada di DLH itu sudah cukup memdai yang sangat kurang ini adalah ketersedian TPS yang ada di pemukiman penduduk karna memang sesuai amanah peraaturan daerah harusnya setiap perumahan kawasan pemukiman itu harus menyediakan tempat pembuangan sampah sementaranya yang di bangun atau dibuat oleh si pengelola atau penanggung jaawab kawasan contoh komplek perumahan itu adalah divelover kalau pemukiman itu adalah rt dan juga kelurahan tugas pemerintah daerah itu hanya mengangkut ke tps ke tpa atau mengangkut dari tps ke pengelohan selanjutnya hal ini lah yabg menjadi keterbatasan dalam hal sarana prasaran kalau dari sarana prasarana untuk pengelohan sampah dari pemerintah itu sudah sangat cukup tapi TPS itu masih di anggap kurang jumlahnya dari segi persentasi rasio jumlah penduduk.”*

1. Menurut bapa apakah sumber daya kewenangan yang ada pada dinaas lingkungan hidup kab. Tabalong sudah baik dalam mengimplementasikan pengelolaan sampah.

*“oke kewanangan nya sudah cukup baik, itu sudah ada pembagian kewwenangan apa itu kewenangan dari pemerintah daerah apa itu kewenangan masyarakat atau itu kewenagan pelaku usaha jadi disana di konsep pengurangan itu lebih banyak berperan dimasyarakat dari mulai pembatasan , pemanfaatan pendaur ulangan sampah hingga kewenangan sampah itu masih jadi tanggung jwab masyarakat sampai sampah itu ke TPS nah dari tps itu lah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengolah kembali di TPA jadi pembagian kewenangan yang teratur di peraturan daerah no14 tahun2017 tentang pengololan sampah sudah sangat baik sekali dan implementasinya pun lambat laut kita sudah sesuai dengan yang di amanahkan oleh peraturan daerah tersebut”*

Pada wawancara Ketiga saya memilih informan dari KASUBAG Persampahan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Tabalong yang mengatakan bahwa:

1. Menurut ibu bagaimana peran sumber daya manisia dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampag pada dinas lingkungan hidup kab. Tabalong apakah sudah cukup baik atau memang dirasa kurang karena kurangnya peranan sumber daya manusia.

*“kalau pegawai negeri kita ada indikatornya tiap hari kita mengisi aktifitas kedisiplinan kinerja, aktifitas kedisiplinan kinerja kita terukur setiap hari dan setiap bulan, implementasinya langsung kita hubungkan dengan tunjangan seperti halnya pemerintah pegawai negeri sipil, indikatornya apabila tidak tercapai kegiatan ada khusus aplikasi khusus untuk mengukur kinerja karyawan itu untuk pegawai negerinya. Sedangkan untuk petugas lapangan, dari pengawas langsung karna disetiap lokasi itu memiliki pengawas, indiktornya kalaunya petugas penyapu sampah berarti bersih tidak ada lagi sampah di lokasi petugas tersebut apabila tidak bersih beararti masih belum itu dari sumberdaya manusianya.”*

1. Menurut ibu bagaimana peran sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada dinas LH kab. Tabalong apakah sudah cukup aik atau memang dirasa kurang kerna rendahnya anggaran yang di dapat.

*“kalau anggaran mungkin ibu tidak terlibat langsung karna ibu tidak ada hubungan langsung dengan bidang persampahan.”*

1. Menurut ibu bagaimana peran sumber daya peralatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada dinas LH kab. Tabalong apakah sudah cukup memadai baik dalam pengelolaan sampah pada dinasnya dan penampungan sampah yang ada di masyarakat.

*“nah ini juga langsung ke bidang yang terkait ibu tidak bisa memberikan jawaban.”*

1. Menurut bapa apakah sumber daya kewenangan yang ada pada dinaas lingkungan hidup kab. Tabalong sudah baik dalam mengimplementasikan pengelolaan sampah.

*“payung hukum sudah memadai ada perbub mungkin ibu tidak banyak memberikan jawaban karna ini langsung bersangkutan dengan bidang persampahan.”*

Pada wawancara Keempat saya memilih informan dari kalangan masyarakat untuk mengetahui tibal balik pelayanan yang di dapatkan oleh masyarakat dalam aspek sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, informan tersebut mengatakan bahwa:

1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana pegawai pengelola sampah dalam pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, apakah sudah cukup baik atau memang dirasa kurang karena kurang nya peranan Sumber daya manusia.

*“menurut saya para pegawai pegelola sampah dinas lingkungan hidup sangat cukup baik karena mereka mengelola sampah dari pengambilan sampah di masyarakat sampai ke tpa itu mereka pilah bagaimana itu sampah rumah tangga sampah organik itu mereka kelola terlebih dahulu apalagi adanya bank sampah itu sangat membantu masyarakat dalam peranan pengelolaan sampah yang ada di kabupaten tabalong ini.”*

1. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah ada yang mengangkut sampah yang ada di wilayah anda, dalam pelaksanaan nya apakah sudah cukup baik atau memang dirasa kurang karena rendah nya anggaran yang didapat.

*“di tempat saya sudah ada yang mengangkut sampah dan sudah diberi sosialisasi agar sampah yang ada di rumah dari pukul 06:00 sore agar meletakan sampah di depan rumah atau di tong sampah yang tersedia untuk dilakukan pengangkutan oleh petugas mereka tersebut.”*

1. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah ada peralatan atau pun tempat pembuangan sampah sementara yang di angkut oleh dinas llingkungan hidup, baik dalam pengelolaan sampah pada dinas nya dan penampungan sampah yang ada di sekitar masyarakat.

*“ menurut saya sudah ada dan kita lihat ada beberapa titik seperti di belkang pendopo ada tempat sampah sementara sebelum di angkut ke TPA disitu kita bisa membuang smpah ke tempat tersebut.”*

1. Menurut Bapak/Ibu apakah sumber daya kewenangan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sudah baik dalam mengimplementasikan pengelolaan sampah yang ada di wilayah anda.

*“untuk kewenangan pasti sudah baik apalagi mengelola sampah ini tidak sembarangan ada perutarannya baik itu dari bupati atau dari perda maupun peraturan pemerintah pusat”*

*.*

Pada wawancara kelima saya memilih informan dari kalangan masyarakat untuk mengetahui tibal balik pelayanan yang di dapatkan oleh masyarakat dalam aspek sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, informan tersebut mengatakan bahwa:

1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana pegawai pengelola sampah dalam pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, apakah sudah cukup baik atau memang dirasa kurang karena kurang nya peranan Sumber daya manusia.

*“menurut saya sudah cukup baik karena peran petugas dalam mengelola sampah ini sangat membantu masyarakat apalagi pengambilan sampah yang ada di komplek di masyarakat sekitar itu sangat membantu kita.”*

1. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah ada yang mengangkut sampah yang ada di wilayah anda, dalam pelaksanaan nya apakah sudah cukup baik atau memang dirasa kurang karena rendah nya anggaran yang didapat.

*“untuk yang menggangkut sampah di tempat saya sudah ada tapi untuk anggaran saya kurang tau mungkin anggaran yang mereka dapat sudah sangat cukup menyangkut pengelolaan sampah ini tidak main main apalagi sampah yang dihasilkan setiap hari pun masih bertambah.”*

1. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah ada peralatan atau pun tempat pembuangan sampah sementara yang di angkut oleh dinas llingkungan hidup, baik dalam pengelolaan sampah pada dinas nya dan penampungan sampah yang ada di sekitar masyarakat

*“menurut saya tempat pembuangan sampah sementara di tempat saya belum ada tapi kita di bantu oleh dinas lingkungn hidup untuk menaroh sampah didepan rumah dan siap diambil oleh petugas mereka itu sudah sangat membantu kami dalam menangani sampah rumah tangga.”*

1. Menurut Bapak/Ibu apakah sumber daya kewenangan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sudah baik dalam mengimplementasikan pengelolaan sampah yang ada di wilayah anda.

*“menurut saya kewenangan meraka itu pasti ada peraturan tertulis baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah setempat dalam melakukan pengelolaan sampah yang baik, pengelolaan sampah di tempata saya ini sudah baik dan kami diberi tahu oleh mereka agar mengumpukan sampah di depan rumah dilakukan pukul 06:00 sore.”*

**Tabel: Rekapitulasi Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong**

Tabel 4.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Table Rekapitulasi Implementasi Edward III indikator-indikator sumber daya yang mempengaruhi implementasi di dinas lingkungan hidup kabupaten tabalong | | |
| 1. Staf | terimplementasi | Terimplementasi |
| 1. Informasi | terimplementasi |
| 1. Wewenang | terimplementasi |
| 1. Fasilitas | cukup terimplementasi |

1. **Pembahasan Hasil Penelitian**

Implemensi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong tidak mungkin dapat terwujud apabila hanya mengandalkan pemerintah tanpa adanya partisipasi masyarakat. Maka dari itu implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini dapat dikatakan berhasil dan terwujud jika masyarakat dan pemerintah bersinergi dan mampu bekerja sama dalam hal pengelolaan sampah sehinggah tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut dapat tercapai.

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya perlu menentukan sasaran atau hasil yang ingin dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Seperti tujuan yang ingin di capai dalam kebijakan pengelolaan sampah yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan juga mengurangi limbah atau sampah rumah tangga dengan cara pendirian TPS di pemukiman padat penduduk..

Sehingga tujuan dan sasaran kebijakan yang dilaksanakan harus diukur dan diawasi karna implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan apabila tujuan tersebut tidak dipertimbangkan keberhasilannya. Dan juga dalam pengawasan implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini haruslah dilakukan oleh pihak terkait sehingga dalam pelaksanaanya dapat dikontrol dan ditinjau apakah kebijakan pengelolaan sampah ini telah tepat sasaran serta berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Komunikasi antar Pegawai yang ada disini itu memang sudah sesuai aturan itu ada dikelola oleh pihak SDM berkaitan dengan itu komunikasi kami antar pegawai di antaranya adalah setiap pagi itu melakukan apel, disitu kita arahkan bagaimana supaya pelaksanaan kegiatan setiap harinya berjalan dengn lancar dengan pengarahan awal sebelum melakukan pekerjaan, kemudian juga ada beberapa rapat dalam hal ini dilakukan oleh beberapa bidang kemudian juga untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik itu sudah ada SOP nya dari bidang persampahan itu sdah membuat kebijakan bagaimana mengelola sampah dengan baik diantaranya itu titik lokasi yang ada disana yaitu TPS3R, bang sampah, dan ada TPA.

Pengemplementasian kebijakan pengelolaan sampah untuk kebijakan pengelolaan sampah dan sumber daya relatif karna sampah yang dihasilkan oleh kabupaten tabalong ini awalnya itu di TPA itu hendak mengelola 4 kecamatan kenyataannya TPA saat ini mengelola kumpulan sampah ada 12 kecamatan untuk itu SDM nya saat ini harusya bertambah karna timbunan sampah yang dihasilkan sudah bertambah kemudian juga sarana prasarana angkutan harusnya juga kita tambah mengingat angkutan saraana prasaran yang ada ini sudah lama/memang sudah berumur sehingga setiap tahunnya harusnya ada peningkatan tapi untuk tahun ini 2022 dan 2023 itu tidak ada penambahan untuk peningkatan sarana prasarana juga tambahan untuk personil itu juga berkurang.

Aspek dari sumber daya anggaran disini bisa dikatakan relatif karena anggaran ini sudah di tentukan oleh pemerintah daerah anggaran itu terdiri dari untuk belanja pegawai ada belanja barang dan jasa dan ada belanja pemeliharaan terkait hal itu karna sifatnya ini adalah rutin saya rasa belanja untuk rutin pengelolaan sampah itu sudah cukup baik sedangkan untuk belanja pegawai itu karena tahun ini ada peningkatan tambahan penghasilan itu sudah mencukupi artinya untuk anggaran berikutnya itu bisa ditingkatkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana misal untuk pengadaan truk pengangkut sampah kemudian penambahan kendaraan roda 3 atau tosa, di masyarakat itu sebagai pengumpul ke TPS3R itu harus ada penambahan sarana roda 3 atau tosa.

Untuk aspek sumber daya peralatan itu karena ada beberapa kendaraan yg sudah usianya tua itu memang perlu dilakukan perawatan untuk truk pengangkut itu ada 33 unit itu setiap unit itu pasti ada troble apakah itu bannya atau yang lain itu ada pemeliharaan yang harus di tanggung oleh DLH. Dalam hal ini untuk pengelolaan sampah ke penampungan masyrakat sekitat sudah kita bantu dalam hal pengangkutannya artinya masyarakat tinggal menaroh terus di kelola oleh masyarakat sendiri kemudian dari DLH akan mengambil sampah yang sudah terkumpul dan akan kita bawa ke TPA.

untuk aspek sumber daya kewenangan itu sesuai peraturan yang berlaku, DLH ini sudah bagus artinya ada beberapa kriteria ada pernah mendapatkan piagam penghargaan yaitu berupa nirwa cipta suatantra dan juga penghargaan adipura dalam ini sebagai wujud penghargaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang berhasil mengelola lingkugan hidup dari indikator tersebut itu sudah cukup baik pengelolaan di dinas lingkungan hidup, kemudian juga ttidak kalah pentingnya tingkat partisipasi masyarakat juga lumayan dalam tanda kutip ini artinya memang tidak semuanya masyarakat itu perduli dengan sampah tapi apa boleh buat negara berkembang dmana pun penglolaan sampah ini menjadi isu artinya masyarakat di himbau melalui pendidikan melelaui sosialisasi, melalui pembinaan untuk pengelolaan sampah yang lebih bagus dan menyadarkan dri masyarakat untuk memilah sampah di rumah.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari pembahasan hasil penelitian peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Lihat dari Aspek Sumber Daya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dapat dikatagorikan terimplementasi.

1. **Saran**

Dari kesimpulan di atas saran yang bisa buat adalah:

1. Kebijakan pengelolaan sampah sudah cukup baik dalam penanganan nya, akan tetapi dari sekian banyak pembahasan di atas masih adanya sarana prasarana yang sudah tua atau kurang layak pakai maka setidak nya Dinas lingkungan hidup Kabupaten Tabalong hendak nya bisa menganggarkan untuk peremajaan dari alat operasional untuk alat pengangkut sampah yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong, dan jua hendak nya agar sumber daya manusia nya juga harus di tambah karena tiap tahun pasti akan meningkat jumlah sampah yang ada di Kabupaten Tabalong.
2. Untuk timbal balik masyarakat hendaknya jika adanya keterlambatan dari mengangkut sampah yang ada diwilayah nya hendaknya melaporkan ke dinas terkait agar adanya bahan evaluasi dari dinas terkait untuk keberlanjutan dimasa yang akan datang.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Buku

Bunasim Ahmad Syakrani. 2020. *Tracking a next paradigm of public administration* (jelajah paradigma administrasi negara masa depan)*.* Depok; Rajawali Pers.

Bunasim Ahmad Syakrani. 2022. *Toward a next paradigm of public administration* (jejak-jejak menuju paradigma administrasi negara masa depan) Jilid 2*.* Depok; Rajawali Pers.

Kasmir, (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Ed. Ke-1. Cet ke-1. Rajawali Pers. Jakarta

Mangkunegara, AP. 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia* *Perusahaan*, PT. Remaja Rosolakarya Offset. Bandung

Mangkunegara, AP. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia* *Perusahaan,* Bandung: Rosdakarya

Martono. 2015. Metode Penelitian Sosial. Cet ke-1. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Marwansyah. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Edisi ke-2. Cetakan ke-1. Alfabeta. Anggota IKAPI. Bandung

Riki, SA. 2006 *Sistem Manajemin Kinerja*. Cetakan ke-4. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Simamora, Hani. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 3.* Yogyakarta: STIE YKPN

Sugiono. 2013. *Mitode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* *Dan R&D. Cet ke-19. Alfabeta*. Bandung

1. Jurnal

Hardani Wijaya, Heru Nurasa, Elisa susanti. 2022. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Cimahi (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah): Jane. Universitas Padjajaran

Yusrival. 2022. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Bukit Asri Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba: Universitas Mummadiyah Makasar

Juriko Abdussamad, Fenti Prihatini Dance Tui, Fatmawati Mohamad. 2018. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango: Universitas Bina Taruna Gororntalo.

Teguh Imam Fitroni. 2018. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Kabupaten Lamongan: Universitas Brawijaya Malang.

Pramita Adhinul Putra. 2016. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung: Universitas Terbuka. Jakarta.

Salsabila Kosaza, Budi Setiyono, Wijayanto. 2018. Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta: Universitas Diponegoro Semarang.

Susanti Alfira Takaluhude, Ronny Gosal, Ventje Kasenda. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna: Jurnal Governance.

1. Internet / Google

<https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/forum/discuss.php?d=6356> (05 juni 2023 09.51 WITA)

[https://portal.tabalongkab.go.id/sejarah-tabalong (01](https://portal.tabalongkab.go.id/sejarah-tabalong%20(01) Agustus 2023 11.23 WITA)

****

****

****

****

****